PERCIKAN PEMIKIRAN UNTUK INDONESIA BARU

Editor : Dr. M. Ridhah Taqwa, dkk.

BAGIAN PERTAMA

KLASTER POLITIK
KLASTER HUKUM
KLASTER SOSIAL BUDAYA

FORUM REMBUG NASIONAL (FRN) 2009
FORUM MAHASISWA PASCASARJANA SE-INDONESIA (FWI)

Supported

UGM

UIN SUKA

UII

UNY

PERCIKAN PEMIKIRAN UNTUK INDONESIA BARU

Editor : Dr. M. Ridhah Taqwa, dkk.

FORUM REMBUG NASIONAL (FRN) 2009
FORUM MAHASISWA PASCASARJANA SE-INDONESIA (FWI)

Supported

UGM UIN SUKA UII UNY

Tim Editor:

1. M. Ridhah Taqwa
2. Zuhri Humaidi
3. Ainur Rahim
4. Andi Fajar Asti
5. Musdalifah Dachrud
6. Abdullah Sumrahadi
7. Akh. Syamsul Muniri

Cetakan : Pertama, 2009

Diterbitkan atas kerjasama: FWI dan Jurnal Paradigma

ISBN: 978-602-8627-06-1

PENGANTAR EDITOR

Prisma Pemikiran; Renungan untuk Indonesia di Awal Abad Baru

Zuhri Humaidi

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah prosiding dari "Forum Rembug Nasional Mahasiswa Pascasarjana" (FRN) tanggal 12-14 Maret 2009 yang lalu. Acara itu bertema *"Kepemimpinan Nasional dan Agenda Pemerintahan 10 Tahun ke Depan; Tantangan, Peluang, dan Harapan Untuk Indonesia"* yang bertempat di Yogyakarta. FRN tersebut diprakarsai oleh empat universitas penting, yaitu UGM, UIN, UNY, dan UII, serta diikuti oleh perwakilan mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia, akademisi, aktifis, praktisi, dan elemen-elemen lain yang terkait. Hari pertama adalah Munas FWI (Forum Wacana Indonesia) ke-V, organisasi mahasiswa Pascasarjana di tingkat nasional yang telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, sedangkan hari kedua dan ketiga adalah rangkaian diskusi dan seminar yang membicarakan isu-isu kebangsaan dalam berbagai dimensinya seperti politik, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dan hukum. Dari awal, konsep Acara FRN memang memberikan panggung yang luas bagi mahasiswa Pascasarjana untuk mempresentasikan temuan penelitian mereka dalam diskursus ilmu pengetahuan dan sosial, serta pada gilirannya memberikan rekomendasi atas aneka persoalan yang dihadapi masyarakat dan negara akhir-akhir ini. Hal tersebut sejalan dengan gerakan yang menegaskan pentingnya peranan kaum muda dalam kepemimpinan

bangsa yang deras menggema dan mewarnai peringatan 100 tahun kebangkitan nasional. Tidak perlu lagi kami (editor) menguraikan siginifikansi gerakan tersebut karena telah menjadi isu paling provokatif di tahun 2008 kemarin.

Dengan demikian, sebagian tulisan yang terdapat dalam buku ini adalah kertas kerja yang telah didiskusikan dalam forum tersebut, sedangkan beberapa tulisan lain adalah tulisan susulan dari rekan-rekan panitia yang sengaja kami minta untuk melengkapi isu-isu yang belum sepenuhnya tercakup. Karenanya tugas kami sebagai editor menjadi agak sulit. Membenahi kata dan struktur kalimat supaya renyah dan mudah dipahami, membetulkan salah ketik, serta merapikan tulisan sesuai dengan kaidah baku dalam standar ilmiah adalah tugas teknis yang memang harus dilakukan. Tetapi yang lebih sulit adalah menjaga ritme dan keterkaitan antara satu tulisan dengan tulisan lain sehingga meskipun buku ini sebuah bunga rampai, akan tetapi disatukan oleh satu *passion* yang sama. Untuk memudahkan tugas itu, kami kemudian melakukan klasifikasi dalam enam kluster pokok, yaitu politik, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hukum, dan sosial budaya. Harus kami akui bahwa langkah tersebut memang penuh resiko karena satu tulisan bisa jadi memuat isu dalam disiplin ilmu yang beragam. Sebuah tulisan adakalanya menggunakan pendekatan politik, hukum, dan ekonomi sekaligus. Jika ini terjadi maka kami mempertimbangkan muatan isu yang paling dominan.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, memang muncul *genre* tulisan yang kerap kali memadukan pendekatan dalam beberapa disiplin ilmu. Seperti pernah dikemukakan almarhum Umar Kayam, sejak tahun 1980-an terjadi perubahan paradigmatik dalam ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin sosial dan humaniora. Muncul kesadaran bahwa klasifikasi disiplin ilmu tidak bisa tegas dan kokoh seperti dulu seakan-akan sebuah disiplin merasa cukup di dalam dirinya, terkotak-kotak dalam batas yang sempit. Perkembangan paradigma ilmu pengetahuan serta dinamika masyarakat dan sejarah yang semakin kompleks mensyaratkan adanya perspektif yang lebih integratif, sehingga memungkinkan seorang ilmuwan memahami serta melakukan prediksi atas setiap gejala yang terjadi. Hal inilah yang mengharuskan kesetiaan seorang ilmuwan terhadap sebuah

disiplin tidak membuatnya kehilangan horison dalam mempelajari kekayaan disiplin ilmu lainnya.

Tulisan dalam buku ini cukup variatif, tidak hanya pada level isu yang diangkat melainkan pada intensi dan kekuatan yang dimilikinya. Mengukur intensi dan kualitas sebuah tulisan adalah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Akan tetapi biarkan kami, mendahului sidang pembaca yang budiman, menggunakan parameter yang lebih proporsional. Sebuah pemikiran atau temuan penelitian akan dihadapkan pada dua ujian, pertama, sejauh manakah ia relevan secara intelektual, dan kedua, bisakah ia relevan secara sosial. Adakalanya ia memenuhi baik relevansi intelektual dan sosial, tetapi banyak juga yang hanya memenuhi salah satu. Sebuah pemikiran yang dianut dan diterima luas tidak selalu yang paling benar dan unggul secara teoritis, sebaliknya pemikiran yang sangat berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual tetapi dengan cepat dilupakan karena tidak memiliki pengaruh apapun secara sosial. Tulisan yang diterima luas adalah tulisan yang cocok dengan kebutuhan dan biasanya secara praktis dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, meskipun compang camping secara intelektual. Hal ini disebabkan karena test terhadap relevansi intelektual maupun relevansi sosial berbeda. Yang pertama, dilakukan melalui pengujian terhadap konsistensi, logika, dan kekuatan datanya, sedangkan yang kedua dilakukan dengan mengukur luasnya respon dan penerimaan atasnya karena memiliki kecocokan momentum dan nilai praktis.(Ignas Kleden, 1987). Jika dinilai menggunakan kategori di atas, tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan tarik menarik di antara dua kategori di atas. Misalnya tulisan tentang proses abstraksi dalam matematika, pemikiran JJ. Rousseau tentang politik, atau diskursus perempuan dalam seni pertunjukan lebih memiliki bobot relevansi inteletual, sedangkan tulisan tentang metode pemanfaatan limbah termoplastik polipropilen, merebaknya politik identitas, serta pembahasan undang-udang KDRT lebih menunjukkan perhatiannya dalam mengurai masalah sosial yang terjadi.

Terlepas dari perdebatan di atas, terbitnya buku ini bisa dimaknai dalam dua hal penting. *Pertama,* buku ini hadir di tengah hiruk pikuk Pemilu yang menyita energi, pikiran, dan dana dari seluruh anak

negeri. Ragam tulisan dan isu yang terdapat di dalamnya meyakinkan kita bahwa persoalan yang paling mendasar sesungguhnya bukan siapa yang patut terpilih sebagai Presiden maupun anggota legislatif, melainkan siapapun yang nantinya terpilih pasti akan dihadapkan pada sejumlah masalah multidimensional yang pelik. Tidak saja pada upaya pemulihan ekonomi, tetapi pada upaya penegasan kembali makna berbangsa dan bernegara di tengah-tengah dinamika pergaulan antar bangsa dan masyarakat yang semakin intens. Buku ini ingin memberikan suatu dasar pijak dan peta arah bagi suatu *policy* yang lebih visioner dan berdampak luas. *Kedua,* buku ini mudah-mudahan bisa menambah makna satu abad kebangkitan nasional yang sejak 2008 kemarin dirayakan dengan sejumlah optimisme dan harapan akan perubahan. Keyakinan tersebut tidak berlebihan jika melihat sejarah Nusantara pada abad-abad yang lampau, di mana perubahan-perubahan besar hampir selalu terjadi di pergantian abad. Nasionalisme muncul di awal abad 20 yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi modern, partai politik, surat kabar, serikat buruh, karya sastra dan lembaga pendidikan. Runtuhnya Majapahit dan munculnya Islam sebagai kekuatan politik baru (14 M), datangnya kolonialisme (16 M), serta runtuhnya kolonialisme VOC yang digantikan dengan Kerajaan Belanda (18 M), masing-masing terjadi pada pergantian abad. Tidak mengherankan jika banyak kalangan kemudian menaruh optimisme tinggi. Dalam satu dasawarsa ini, sejak reformasi 1998, muncul transformasi dalam kehidupan kebangsaan seperti kebebasan pers, meningkatnya perhargaan terhadap hak sipil dan politik, beragamnya partai politik, menguatnya *civil society* dan sebagainya. Meskipun hal tersebut diiringi dengan kecenderungan lain yang mengkhawatirkan. Munculnya banyak partai politik agaknya hanya memperkukuh fragmentasi politik, yang jika tidak hati-hati akan menjurus pada fragmentasi sosial. Demikian juga maraknya politik identitas serta gejala fundamentalisme yang semakin menguat menunjukkan hilangnya kohesivitas sosial dan kepercayaan diri masyarakat menghadapi arus globalisasi dan modernitas yang demikian gencar. Karenanya abad baru dan juga alaf (milenium) baru yang sedang kita jalani menawarkan optimisme dan sekaligus juga kekhawatiran. Penemuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang telah dicapai

dan dirasakan manusia Indonesia memang akan mempermudah proses kehidupannya, tetapi jika tidak hati-hati akan melumatnya dalam kehancuran yang singkat. Buku ini memang tidak menawarkan solusi atas problem di atas, tetapi setidaknya memperjelas posisi, prestasi, tantangan dan kemungkinan yang kita hadapi di awal abad ini.

Terbitnya kumpulan artikel ini menjadi sebuah buku merupakan kerja keras dan jasa dari banyak pihak. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, terutama kepada Bapak Wapres RI (Jusuf Kalla) yang telah banyak membantu serta mengijinkan naskah pidatonya pada acara tersebut kami terbitkan kembali dalam buku ini, serta kepada Dirjend Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI, Direktur Pascasarjana empat universitas (UGM, UIN, UNY, dan UII), pengelola Jurnal Paradigma HMP UGM, dan kepada seluruh pemakalah dan peserta FRN. Kami juga berucap terima kasih kepada seluruh pengurus FWI dan panitia FRN dengan tawa dan kebersamaannya yang hangat selama ini. Tidak lupa juga pada rekan Septi dan Afif atas ketekunannya menyediakan bahan-bahan yang kami perlukan untuk penyusunan buku. Tanpa pengorbanan waktu, tenaga dan dana dari pihak-pihak di atas mustahil buku ini bisa terbit dalam wujudnya yang sekarang.

Akhirnya, apa yang kami uraikan di atas adalah upaya menjelaskan latar belakang serta posisi buku ini dalam kehidupan akademik dan sosial kita. Tentu saja terserah kepada pembaca yang budiman bagaimana memposisikan dan meresponnya. Buku ini berisi kumpulan artikel dengan intensi, kualitas, dan tesis yang masing-masing berbeda. Biarlah ia menjadi rekaman dari satu fase dalam diskursus keilmuan di tanah air, seperti kata Mao Tse Tung di awal revolusinya yang menggetarkan itu; *"biarkan seribu bunga tumbuh, biarkan seribu bunga mekar, menjadi taman yang indah"*. Mudah-mudahan buku ini sudah memenuhi persyaratan sebagai "taman yang indah".

Yogyakarta, 16 Juni 2009

An. Tim Editor

Zuhri Humaidi

DAFTAR ISI

Pengantar Editor
Prisma Pemikiran; Renungan untuk Indonesia
di Awal Abad Baru iii
Zuhri Humaidi
Daftar Isi ix
Sambutan Ketua Umum FWI 2009-2011 xiii
Prolog: Pembicara Utama: M. Jusuf Kalla xvii
Klaster Politik 1
Kepemimpinan Nasional Dan Politik Identitas:
Ketidakberdayaan Negara Dalam Membangun Bangsa 3
Susetyawan, UGM
An empirical evidence of Local government characteristics in
Indonesia 15
Putriesti Mandasari, UNS
Reproduksi Kuasa Perempuan dalam Pembangunan 27
Deditiani Tri Indrianti, UGM
Islam, Lokalitas, dan Peranan Perempuan *(Studi terhadap kepemimpinan perempuan di NW Lombok Timur, NTB)* 45
Pitriyah, UIN
Agama dan Politik (Studi Tentang Keterlibatan Kiai dalam
Pilkada Kabupaten Pandeglang) 61
Rahmatullah, UIN Sunan Kalijaga
Politik Islam di Makassar : Kiprah Partai Politik Islam
pada Pemilu 1955 – 1977 81
Subarman, UNHAS Makassar
Muhammadiyah dan Politik Islam Indonesia:
Kasus Amandemen Konstitusi dan Proses Legislasi
Pasca Orde Baru 105
Syarifuddin Jurdi, UIN Sunan Kalijaga
Pemilihan umum sebagai praktik demokrasi:
Demokrasi prosedural vs demokrasi subtansial 127
M. Ridhah Taqwa, UGM

Hegemoni asing terhadap kedaulatan Indonesia ; Pengaruh dan Responnya di Masa Mendatang 145
Fatkurrohman, UGM
Mengurai Relasi Eksekutif-Legislatif Daerah : Kajian Kontekstual Menuju *"good local governance"* 163
Andries Lionardo, UNSRI Palembang
Dialog teori situasional dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia.....173
M. Nur Budiyanto, UNSRI
Kontrak Sosial JJ. Rousseau dan Kesadaran Akad Politik dalam pemilu di Indonesia.....197
Muhammad Azani, UIN Sunan Kalijaga

Klaster Hukum 211
Berbenah dalam Bernegara Hukum Lewak Kebijakan Legislasi Yang lebih Berkualitas 213
M. Zulfa Aulia, UNDIP
Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Berdimensi Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Penggusuran Kelompok Masyarakat Marginal di DKI Jakarta) 229
Yohanes Suhardin, UNDIP
Korupsi dari Orde Lama Hingga SBY-JK & Upaya Pemberantasannya. 251
Suraji, UGM
Wacana Penerapan Hukum Islam dalam Tinjauan Politik Hukum Nasional 269
Sirajuddin M., STAIN Bengkulu
Kepemimpinan Berperspektif Keadilan Interaksional untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Organisasi.....295
M. Johan Nasrul Huda, UIN Sunan Kalijaga
Reinventing UU Penghapusan tindak kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 311
Eka Septi Kurniawati, UIN Sunan Kalijaga
Pertautan Hukum Islam dan Hukum Adat Menuju Sistem Hukum Nasional 327
Susilawetty, UMJ

Eksistensi dan Model Alternatif Hukum Adat Laot Menuju Keberlanjutan Lingkungan dan Pengentasan Kemiskinan.....357
Sulaiman Tripa, UNDIP
Politik Hukum dalam Islam
(Memotret Demokrasi di Indonesia) 377
Ach. Syamsul Muniri

Klaster Sosial-Budaya.....391
Merayakan Kekerasan dalam Masyarakat Multikultural.....393
Ali Osman, UIN Sunan Kalijaga
Tabot: Local Genius yang Membingkai Semangat Multikulturalisme Masyarakat Bengkulu.....413
Zubaedi, UIN Sunan Kalijaga
Dari Balinisasi ke Ajeg Bali (Membongkar Politik Identitas ke-Bali-an Dalam Kuasa Budaya).....437
I Ngurah Suryawan, UGM
Bahasa dan Pemarjinalan Perempuan Dalam Seni Pertunjukan Ragam Humor di Kota Denpasar 469
I Made Netra, UNUD
Reaktualisasi Peran LSM dalam Mendorong Terciptanya *Good Governance* di Era Reformasi.....489
Zuhri Humaidi, UIN Sunan Kalijaga
Evaluasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur.....503
Herry Yulistiyono, Univ. Trunojoyo
Ketika Anak Muda Desa Payangan Bersentuhan dengan "Film" 525
Ariani Ratna Budiati, UGM
Searching for Love: A Documentary Film in Legalizing Inter-Faith Marriage 541
Kusuma Subakir, UGM
Penggunaan Bahasa Iklan dalam Media Massa Tahun 1980-an dan Tahun 2000-an.....561
Fatma, Mahasiswa S2 Linguistik UGM
Wajah Agama dalam Dunia Kaum Muda: Transformasi Tafsir Sosial-Budaya atas Teks Ajaran.....573
Abdullah Sumrahadi, UIN Sunan Kalijaga

Rekomendasi.....595
LAMPIRAN.....597
Sekilas Sejarah FWI.....597
Susunan Pengurus.....603

***

Rekomendasi.....595
LAMPIRAN.....597
Sekilas Sejarah FWI.....597
Susunan Pengurus.....603

***

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT FORUM MAHASISWA PASCASARJANA SE-INDONESIA PADA PLENO UMUM FORUM REMBUG NASIONAL (FRN)

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden H. M. Yusuf Kalla berserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Nasional Bapak Bambang Sudibyo beserta Ibu Retno Bambang Sudibyo, yang kami hormati para mentri Kabinet Indonesia Bersatu, kemudian para tamu undangan, para peserta Forum Rembug Nasional, Mahasiswa Dan Alumni Pascasarjana Se-Indonesia.

Pertama-tama tentu saja kita mengucapkan syukur Alhamdulillah karena atas ridhonya sehingga kita pada siang yang sejuk dan segar ini bisa bertemu di tempat ini bersama para pimpinan kita dalam rangka forum rembug nasional mahasiswa dan alumni pascasarjana se-indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kami laporkan dalam kesempatan ini, yang pertama adalah tentang forum rembug itu sendiri, yang kedua adalah apa itu FWI Forum Wacana atau kepanjangannya adalah forum mahasiswa dan alumni pascasarjana se-Indonesia, kemudian yang lain-lain sekitar rekomendasi dan harapan-harapan dari kami terhadap pertemuan ini, dan saya kira yang terakhir adalah ucapan terima kasih.

Hadirin sekalian, yang pertama kami sampaikan bahwa forum rembug nasional ini merupakan rangkaian dari beberapa acara, yang pertama pada tanggal 12 maret kemaren itu sudah berlangsung munas ke-V dari forum mahasiswa pasca sarjana se-Indonesia, dan alhamdulillah kami diamanahi untuk mengemban atau menahkodai organisasi yang sangat besar ini untuk dua tahun kedepan. Kemudian yang kedua adalah diskusi, diskusi ini ada dua macam, yang pertama diskusi antar mahasiswa dan alumni pascasarjana itu menghadirkan 33 makalah terbaik dari maraouke sampai sabang, dari 33 makalah tersebut kemaren mereka sudah merumuskan hasilnya dan insya'allah akan dibukukan bersama makalah bapak-bapak para ahli ini dan kita akan menyampaikan langsung beraudien dan kita minta izin dengan Bapak wapres bisa beraudiens menyampaikan hasil-hasil dari forum rembug ini. Selanjutnya adalah diskusi panel yang merupakan pleno umum hari ini dengan menghadirkan para ahli, para pakar, dan para tokoh, tetapi proporsi untuk mahasiswa pascasarjana itu lebih banyak. Kami dari forum ini selalu mengusahakan lebih banyak mahasiswa yang tampil, alasannya adalah sederhana sekali. Kami sebetulnya bangga menghadirkan para tokoh, tetapi akan lebih bangga lagi kalau menghasilkan atau menelorkan tokoh-tokoh yang lebih muda supaya ada regenerasi. Begitulah tujuan kami dalam acara ini sehingga proporsi untuk mahasiswa itu lebih banyak, begitu pula yang sudah kita lakukan pada tahun kemaren yaitu Penyelenggaraan simposium nasional mahasiswa pascasarjana se-Indonesia hanya mahasiswa yang kita hadirkan, kecuali pembicara utama.

Kemudian perlu kami sampaikan atau mengenalkan kepada bapak wakil presiden beserta rombongan dan para hadirin sekalian bahwa kami dari mahasiswa pascasarjana mempunyai organisasi, namanya forum mahasiswa dan alumni pascasarjana Se Indonesia. Forum ini didirikan pada tahun 2000 tepatnya, sama seperti bulan ini yaitu bulan Maret di malang dan yang sekarang ini adalah Munas yang ke-V. Kemudian latar belakangnya pendirian organisasi tentu saja macam-macam, tetapi yang paling pokok kami melihat potensi mahasiswa pascasarjana itu sangat besar, selain jumlahnya sangat banyak dan berasal dari berbagai latar belakang daerah, profesi, juga banyak mahasiswa pascasarjana yang masih belum punya pekerjaan. Kemudian ada trend, setidaknya ada tiga trend dari proses ini.

Pertama banyak di antara mereka itu yang berusia lebih muda, semakin banyak jumlahnya yang belum bekerja tetap dan yang terakhir mohon maaf, banyak pula yang belum menikah. Nah, kita melihat bahwa semua ini merupakan modal sosial untuk bagaimana saling bersilaturahmi antar mahasiswa pascasarjana tersebut.

Kami juga perlu menyampaikan bahwa apa yang menjadi tujuan dari organisasi ini terutama ingin meningkatkan dialog, atau komunikasi, tidak hanya antar mahasiswa pascasarjana tetapi juga antar mahasiswa pascajarjana dengan pengelola program pascasarjana di masing-masing perguruan tinggi. Hal ini penting dilakukan karena banyak keluhan seperti yang disampaikan oleh para peserta FRN dari seluruh Indonesia kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa masih banyak pengelola pascasarjana yang dalam pengelolaannya tidak terlalu terbuka untuk memberi ruang dialog dengan mahasiswanya. Kemudian dirasakan juga bahwa pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi seolah-olah yang di utamakan adalah strata S1, sementara itu mahasiswa S2 dan S3 belum terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Seringkali ketika ditanyakan apakah ada anggaran untuk mahasiswa pascasarjana, jawabannya tidak ada, yang ada adalah mahasiswa S1. Saya pikir sistem pendidikan seperti ini tentu saja perlu perlu dibenahi ke depan.

Yang kedua adalah forum ini sebagai ruang bagi para mahasiswa untuk *transfer of knowledge*, baik di antara mahasiswa pascasarjana maupun dengan pihak-pihak yang lain. Dan yang terakhir kami sedang rencanakan ini adalah terutama supaya organisasi mahasiswa di tingkat pascasarjana menjadi ruang bagi kami untuk mengembangkan bakat-bakat kepemimpinan. Saya kira ini penting artinya agar ke depan diharapkan bahwa mahasiswa dan alumni pascasarjana dalam memimpin bangsa ini bisa sukses seperti pemimpin lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Wakil Presiden H. M Yusuf Kalla bersama Ibu beserta rombongan. Kami terus terang sudah beberapa hari ini jadi tegang, apakah bapak jadi atau tidak datang di forum ini? Kalau jadi ya alhamdulillah dan kalau tidak jadi ya astaghfirullah, karena menurut saya kerja keras dari

panitia sudah luar biasa untuk mempersiapkan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Pendidikan Nasional Bapak Bambang Sudibyo dan kami mengharapkan kesediaanya untu memberikan sambutannya.

Kemudian kami sangat disemangati oleh para peserta Forum Rembug Nasional. Semangatnya adalah semangat kebersamaan. Hal ini kami rasakan ketika pencalonan ketua umum kemarin yang menunjukkan betapa indahnya kebersamaan. Dan itulah yang kami lakukan sehingga hanya dalam jangka 12 jam proses musyawarah (Munas V FWI) bisa menyelesaikan semua agenda. Tidak ada gelas yang terlempar, tidak ada meja yang didobrak. Alhamdilillah semuanya berlangsung sukses dan demokratis, yang kalah dalam pemeilihan sangat legowo dan yang menang tidak lupa diri atau membanggakan diri. Peristiwa ini mungkin ujian yang terakhir sebelum saya ujuan terbuka (disertasi). Saya sering bercanda dengan teman-teman bahwa ujian luar kelas kadang-kadang lebih berat dari ujian dalam kelas, mungkin itulah yang saya alami seperti sekarang ini. Saya kira mungkin demikian dan yang paling terakhir adalah kepada panitia yang perlu diberikan salut yang luar biasa terhadap dedikasinya, kebersamaannya. Para perserta sangat bangga terhadap panitia, panitia pun sangat bangga terhadap pesertanya. Saya yakin inilah bentuk kebersamaan dan kedepan sesuai tema bahwa agenda sepuluh tahun kedepan, kepemimpinan dengan saling keterbukaan, dialog dari hati ke hati sangat penting sekali. Hal ini akan menjadi inspirasi bagi kami mahasiswa dan alumni pascasarjana untuk juga berkonstribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah bangsa, untuk tanah air kita tercinta, tanah air Indonesia.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hotel Sheraton Yogyakarta, 14 Maret 2009

M. Ridhah Taqwa

PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PRAKTIK DEMOKRASI:

Demokrasi Prosedural Vs Demokrasi Subtansial

M. Ridhah Taqwa
Kandidat Doktor Sosiologi UGM dan
Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UGM, 2007-2012.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kode Fakultas 0 | Kode PS/Bagian 8 0 2 | Kode Publikasi 1 5 | Kode Penulis 0 1 | Tahun Publikasi 0 9 | Kode Sumber Tulisan 0 2 | Nomor urut Publikasi dari Fakultas 0 2 5 2

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikonsepsikan dalam masa transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi, masih memelukan waktu yang panjang untuk mencapai demokrasi yang subtansial. Mengingat kita berada dalam masa totaliter-otoritarian semasa rezim orde baru yang cukup panjang (30-an tahun), maka tidak mudah untuk mengubah budaya dan sistem politik ke arah konsolidasi demokrasi. Budaya politik kita yang telah terbangun sejak era orde lama dan orde baru masih sangat kental, sehingga belum memberi ruang yang cukup terbuka untuk membangun demokrasi yang subtansial. Apalagi jalur yang ditempuh berupa reformasi melalui institusionalisasi kelembagaan politik seperti amandemen UUD 45, kebebasan pers dan pendirian partai politik, perubahan Undang-Undang Politik (UU Pemilu, UU Parpol, dan UU Pilpres serta UU Pemerintah Daerah), bagi sebagian kalangan masih dipandang sebagai reformasi setengah hati.[2]

---

[2] Undang-undang Pemilu misalnya dipandang setengah hati karena menganut sistem proporsional terbuka, esensinya tertutup. Terutama berlaku pada Pemilu 2004. Republika, 23 Pebruari 2003.

Untuk sampai ke arah konsolidasi demokrasi, memang tidak cukup dengan pergantian kekuasaan, tetapi harus pula dibangun sistem perpolitikan pada semua level, lokal dan nasional, baik dari sisi institusi politik, proses politik dan budaya politik. Kesemuanya itu harus dibangun secara paralel dan berkesinambungan sehingga tidak sekedar mengikuti prosedur, tetapi benar-benar mencapai apa yang disebut demokrasi subtansial. Kalau semua komponen demokrasi, dari masyarakat sipil, partai politik dan institusi negara lainnya dapat bangkit untuk mendorong ke arah sana, maka soku guru demokrasi seperti pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah melalui pemilu akan dapat mewujudkan kedaulatan yang benar-benar ditangan rakyat dan akan melahirkan pemerintahan demokratis.

DEMOKRASI DAN MAKNA PEMILU

Setelah tumbangnya rezim orde baru, banyak orang berharap demokrasi yang sesungguhnya segera akan menjadi kenyataan. Padahal perjuangan ke arah sana, yaitu terbangunnya tertib politik dan konsolidasi demokrasi, masih sangat panjang bahkan berliku.[3] Demokrasi bukanlah dewa penyelamat yang hadir begitu saja, tetapi ia harus diperjuangkan agar tidak menemui kegagalan. Josef Brodsky seorang pujangga Rusia pernah menulis, "orang yang bebas, jika gagal tidak menyalahkan siapapun'. Begitulah warga negara demokratis yang harus memikul tanggung jawab terhadap nasib masyarakat yang memerintah yang telah terpilih.[4]

Untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada umumnya negara yang menganut paham demokrasi melembagakannya melalui pemilihan umum. Karena itu, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak menyelenggarakan pemilu jika pemerintahannya berpaham demokrasi apapun varian paham demokrasinya. Demokrasi pada dasarnya terbagi dalam dua kategori demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.[5] Umumnya demokrasi langsung untuk memilih person, namun untuk perumusan

---

[3] Lihat T.N. Effendi, *Lika-Liku Demokrasi: Sebuah Pengantar.* Dalam G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi.* CCSS dan Pustaka Pelajar, 2003: hal. x.

[4] Lihat, *Apakah demokrasi itu* ? US-IA, tanpa tahun, hal. 3

[5] Lihat *Desentralisai & Demokrasi Lokal,* Annual Report 2001-2002, IRE, 2002.

dan pengambilan keputusan kebijakan publik menggunakan demokrasi perwakilan. Meskipun sebelumnya di sejumlah negara (seperti di Athena Yunani) pada masa lalu dapat melakukan demokrasi langsung untuk menentukan kebijakan publik.

Dalam kehidupan politik yang demokratis, makna pemilu yang paling mendasar atau subtansial adalah sebagai wahana pergantian dan perebutan kekuasan berdasarkan regulasi, etika dan norma politik. Dengan dasar subtansial itu, maka melalui pemilu diharapkan sirkulasi elit politik akan berlangsung secara damai dan beradab, sehingga memenuhi kriteria demokratis, tidak hanya secara prosedural tetapi yang paling utama demokratis secara subtansial.[6] Hal ini penting menjadi perhatian kita bersama mengingat masa transisi demokrasi setelah kejatuhan rezim Soeharto cenderung berlangsung lama.

Pemilu sebagai wahana resmi perebutan kursi kekuasaan menjadi arena partai politik berikut para calon legislatif untuk berkompetisi menggugah atau menarik simpati rakyat (pemilih). Dengan demikian pemilu selain memiliki daya tarik juga memiliki daya rusak yang luar biasa. Bahkan daya rusak pemilu dapat melampaui batas-batas etnis, ras, agama dan ikatan sosial lainnya. Karena begitu kompetitifnya sehingga norma dan nilai serta regulasi politik seringkali tidak mampu membendung daya tarik kekuasaan yang berdaya rusak itu. Karena itu kekuasaan politik dalam era transisi di tanah air yang memiliki daya tarik luar biasa sangat potensial pula melahirkan daya rusak yang tinggi pula terhadap kelembagaan pemilu. Betapa tidak karena semua kekuatan politik, terutama yang direpresentasikan partai politik peserta pemilu semuanya memaksimalkan sumberdaya politik yang dimiliki untuk merebut kekuasaan. Baik itu dari partai lama maupun partai baru, baik aktor politik lama maupun baru. Para aktor politik tersebut terdapat diantaranya yang dapat dikategorikan sebagai politikus busuk yang oleh sejumlah kalangan sangat patut dienyahkan dari panggung politik nasional. Karakter atau perilaku politik para politisi busuk ini akan berdaya rusak tinggi terhadap konsolidasi demokrasi di tanah air.

---

[6] Lihat Kristiadi, *Pemilu 2004; Agenda bangsa melembagakan proses politik.* Kompas, 4 Pebruari 2003 & A. Gaffar: *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.* Pustaka Pelajar, 1999: hal. 3.

Oleh karena itu konsolidasi demokrasi merupakan suatu keniscayaan dan menjadi tantangan berat bangsa kita dewasa ini. Pada dasarnya konsolidasi demokrasi yang dimaksud merupakan proses pencapaian legitimasi yang luas dan mendalam, sehingga para aktor politik, pada level elit dan massa percaya bahwa rezim demokratis adalah yang paling benar dan tepat bagi masyarakat. Para aktor (elit) politik harus memegang teguh demokrasi (hukum prosedur dan institusi yang ditetapkannya) sebagai satu-satunya kerangka kerja untuk menata dan memajukan masyarakat. Pada level massa (pemilih) harus pula ada konsensus normatif yang melintasi batas-batas etnis, agama, daerah dan budaya. Menurut Dankwart Rustow (dalam Eko, 2002) konsolidasi mencakup "pembiasaan", dimana norma-norma, prosedur, dan harapan tentang demokrasi terinternalisasi dalam diri aktor, sehingga para aktor secara rutin dan instingtif mencocokan diri dengan aturan permainan, baik yang tertulis maupun tak tertulis.[7] Dengan demikian suatu bangsa yang sedang serius berkonsolidasi secara demokratis dituntut kesadaran yang tingga untuk selalu menegakkan aturan main, peka terhadap aspirasi masyarakat dan senatiasi berbenah diri untuk mewujudkan demokrasi, baik secara prosedural maupun secara subtansial.

SYARAT-SYARAT PEMILU DEMOKRATIS

Pemilu yang demokratis memerlukan sejumlah persyaratan: pertama, bersifat kompetitif artinya perserta pemilu baik parpol maupun calon independen harus bebas dan otonom. Partai politik, baik yang sedang berkuasa maupun partai oposisi (tidak berkuasa) memperoleh hak-hak dan kewajiban politik yang sama, dalam berbicara, berkumpul dan di hadapan hukum. Kedua, pemilu dilaksanakan secara berkala. Artinya secarat teratur dan terjadwal, bukan tergantung pada kehendak penguasa. Dengan berkala ini, maka ada mekanisme dimana pejabat yang telah terpilih bertanggungjawab pada konstituennya dan dapat memperbaharui mandat yang telah diberikan pada pemilu sebelumnya. Dengan berkala ini pula, selain dapat memilih pejabat lama, terbuka pula

---

[7] Lihat S. Eko, *Promosi Demokrasi Alternatif untuk Masyarakat Indonesia,* dalam *Desentralisai & Demokrasi Lokal*, Annual Report 2001-2002 IRE, 2002, hal. 10.

peluang untuk menggantinya dengan kandidat lain yang lebih mampu, lebih aspiratif, lebih amanah dan syarat lainnya. Bagi partai yang kalah atau calon perorangan terdapat pula peluang untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri untuk pemilu berikutnya.

Ketiga, pemilu harus bersifat inklusif. Artinya semua kelompok masyarakat baik kelompok ras, etnik, agama, jenis kelamin, idiologis dan kategori sosial lain memperoleh peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok manapun yang terdisikriminasi oleh sistem pemilu, termasuk kalangan *capable*. Hal ini diharapkan akan menjadi warna keanekaragaman yang menjadi cermin pluralitas masyarakat di suatu negara, seperti halnya Indonesia yang bersifat majemuk. Dan Keempat, pemimpin, pejabat atau wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu haruslah defenitif. Artinya mereka yang terpilih dalam pemilu adalah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, bukan boneka dari suatu kelompok politik atau pejabat lainnya.[8]

PRAKTIK PEMILU LEGISLATIF-EKSEKUTIF DI INDONESIA

Pada pemilu kedua (2004) dan ketiga (2009) setelah kita memasuki era reformasi, Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia selain memilih wakil rakyat (legislatif) juga untuk memilih eksekutif, yaitu pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung. Bahkan setelah disahkannya UU Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah (gubernur dan bupati) pun juga dipilih secara langsung. Sejumlah perubahan mendasar dari sistem pemilu sebelumnya, adalah pemilihan presiden langsung, sistem multi partai, pemilihan anggota DPD juga secara langsung, dan sistem proporsional terbuka, penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan mandiri. Semua perubahan ini memberi peluang berlangsungnya praktek pemilu demokratis, namun realisasinya masih cukup jauh dari harapan. Karena itu dua kali pemilu, 1999 dan 2004, serta pemilu 2009 yang sedang berjalan, ada banyak hak yang perlu disoroti untuk melihat apakah Pemilu sebagai praktek demokrasi sudah memenuhi standar

---

[8] Lihat *Pemilihan* dalam *Apakah demokrasi itu ?* US-IA, 1991. hal. 16-17, dan *Panduan Untuk Pelatihan Pemantau Pemilu 2004*. Cetro, Jakarta, 2003. hal. 3-4.

baik dari sisi institusional, undang-undang maupun proses pemilihan.

Dalam tulisan ini, akan diulas 3 hal, yaitu dari sistem pemilu terbuka; proses pemilu, khususnya rekrutmen calon; dan budaya politik, terutama perilaku voting.

UU PEMILU: PROPORSIONAL SETENGAH HATI KE SEPENUH HATI

Kalau kita simak sistem pemilu menurut UU No. 12 tahun 2003, dan No. 10 tahun 2008, maka tidak tampak perbedaan yang berarti dalam proses pencalonan. Prosedurnya memang tampak demokratis, namun pada dasarnya belum mencerminkan demokrasi langsung yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kulitnya demokratis sedang isinya tidak, karena sistem pemilu legislatif seolah proporsional terbuka tetapi pada dasarnya tertutup.[9] Artinya dengan sistem itu caleg terpilih sebagian besar ditangan elit politik partai yang bersifat sentralistik. Pemilih hanya melegitimasi apa yang sudah diurutkan atau dinominasikan partai. Hal ini terutama berlaku pada pemuli 2004. Sekalipun BPP (bilangan pembagi pemilih) memberi peluang calon urut bawah terpilih, tetapi sangat kecil peluangnya karena besaran BPP sama standarnya dengan suara minimal yang harus diperoleh partai untuk memperoleh satu kursi. Jangankan caleg, partai pun cukup kesulitan untuk mendapatkan suara sebanyak BPP, terutama partai baru atau kecil di daerah pemilihan (DP) jumlah kursi diperebutkan sedikit. Akhirnya, caleg terpilih mayoritas karena diurutan atas, ketimbang karena suaranya memenuhi BPP. Buktinya, dari 550 anggota DPR terpilih pada pemilu 2004 lalu, hanya 2 orang yang memenuhi BPP, yaitu Hidayat Nur Wahid dari PKS (DP Jakarta I) dan Saleh Yasid dari Partai Golkar (DP Riau).

Sistem tersebut masih dianut oleh Parpol sebagaimana yang diputuskan dalam Undang Pemilu Legislatif terbaru, hanya saja BPP diperkecil menjadi 30%. Namun sistem penetapan pemenang tersebut masih diprotes oleh berbagai kalangan, sehingga dibawa ke

---

[9] Istilah lain proporsional terbuka setengan hati (tersingkap). Republika, Tanggal 20 Pebruari 2003.

Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya memang menggembirakan, dimana penetapan pemenang untuk mendapatkan kursi ditentukan berdasarkan suara terbanyak (proporsional murni). Perubahan ini, disatu sisi mencerminkan kedaulatan rakyat (demokrasi penuh hati), namun disisi lain tetap memiliki kelemahan. Persoalannya, pemenang atau peraih suara terbanyak belum tentu bersifat mutlak, karena persaiangan caleg dalam satu Dapil akan cukup ketat. Karena itu, pemenang hanya menjadi peraih suara terbanyak di Dapil-nya, namun suaranya bisa menjadi minimal dibandingkan dengan suara yang diperoleh oleh semua calon lainnya.[10]

Selain itu, terpilihnya seseorang karena sistem ini, belum tentu karena kualitas, tetapi sangat boleh jadi karena popularis saja. Kecenderungan ini patut di antisipasi, karena akahir-akhir ini semakin banyaknya selebritis yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif (DPR dan DPD). Popularitas itulah yang menjadi referensi utama untuk maju dalam pentas politik lima tahunan ini. Oleh karena itu, sistem penetapan pemenang ini masih tetap perlu dievaluasi pada pemilu berikutnya, apakah sudah benar-benar menjadi cermin dari kadaulatan rakyat. Tampaknya, pemilih masih perlu diberi ruang yang lebih luas untuk menentukan calon, misalnya melalui konvensi internal partai untuk menjaring bakal calon legislatif. Hasil dari penjaringan itulah yang kemudian dimajukan sebagai calon oleh partai politik.

Sistem pemilu yang belum kondusif melahirkan legislator reformis, semakin ditunjang oleh perilaku pemilih yang belum menempatkan isu-isu politik seperti KKN sebagai prioritas. Survai LSI di 370 kota dan desa hanya 5 % yang menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas, sedang 70 % menempatkan pemulihan ekonomi.[11] Jadi gerakan jangan pilih politisi busuk pada pemilu 2004, tidak terlalu laku dijual terutama di kalangan bawah yang tingkat ekonominya pas-pasan. Tidak heran jika yang terpilih kebanyakan wajah lama, sehingga penguasa politik pun, khususnya legislatif berada di tangan status quo yang banyak mempertontonkan sikap

---

[10] Lihat S. Pamungkas, MK dan Kedaulatan Rakyat, Kompas, 19 Januari 2009.

[11] Lihat Denny JA. *Menghadang Politikus Busuk.* Media Indonesia, 5 Januari 2004.

dan perilaku politik buruk, seperti kericuhan pada rapat pembahasan kenaikan harga BBM pada 2004 lalu, dan sejumlah kasus korupsi, khususnya suap yang menimpa sejumlah anggota DPR selama 2 tahun terakhir.[12]

POLA REKRUTMEN ELIT DAN POLITISI BUSUK

Pola rekrutmen yang dilakukan parpol masih banyak disorot publik. Antara lain faktor gizi politik (politik uang). Dengan politik uang berlaku hukum, siapa yang paling banyak setoran apalagi memiliki kedekatan dengan pimpinan parpol, maka peluangnya untuk menduduki nomor jadi pada saat pencalonan semakin terbuka lebar. Uang setoran tergantung pada tingkatan pemilihan dan nomor urut. Untuk tingkat DPR dengan nomor jadi mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah, sedang tingkat DPRD puluhan sampai ratusan juta.[13] Tidak heran jika proses rekrutmen calon banyak dipersoalkan karena tidak berlangsung secara demokratis, alias hanya ditentukan oleh elit partai di tingkat pusat. Akibatnya, sebagaian besar yang dicalonkan, selain masih wajah-wajah lama, juga mereka yang berada di Jakarta (elit nasional), bukan elit atau tokoh yang mengakar di daerah.[14] Namun demikian ada pula partai yang menyelenggarakan pemilu lokal (kecil) untuk menentukan balon legislatif, berikut dengan nomor urutnya.

Fenomena lain yang baru dan menarik sejak pemilu legislatif 2004 lalu adalah gerakan anti politikus busuk.[15] Kriteria politisi busuk yang dikemas oleh para penggagas Gerakan Anti Politikus Busuk yaitu, *Pertama*, mereka yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); *kedua*, mereka yang melanggar HAM; *ketiga*, mereka yang merusak lingkungan; serta *keempat*, orang melakukan pelecehan seksual. Keempat kriteria ini memang sangat umum dan tidak semuanya dapat dibuktikan, khususnya perbuatan asusila. Karena itu,

---

[12] Hampir semua partai besar pernah tertimpa kasus korupsi-suap ini, seperti PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP, PAN dan PKB.

[13] Lihat Editorial Media Indonesia, Caleg Biaya Tinggi, 21 Desember 2003.

[14] Lihat Editorial Media Indonesia, Wajah DPR 2004, 22 Desember 2003.

[15] Selain politikus busuk ada pula istilah politisi hitam & politisi bermasalah. Ada dua versi publikasi gerakan ini: hanya kriteria politisi busuk atau sekaligus daftar nama Politikus Busuk. Media Indonesia, 17 dan 18 Desember 2003.

gerakan penjejakan politik (*political tricking*) ini cukup kontraversial dan mengundang protes, terutama mereka yang potensial disebut politikus busuk.

Betapapun kontraversialnnya gerakan *jangan pilih politikus busuk* ini, termasuk mekanisme pembuktiannya mengandung banyak kelemahan, namun patut dicatat bahwa dewasa ini masyarakat khususnya aktifis NGO dan sejumlah elemen mahasiswa sudah berani berhadapan dengan para politikus busuk yang telah *menguasai* negara kita. Apa yang dikemukakan oleh Hasyim Musadi (Ketua PB NU) bahwa kekuasaan dewasa ini berada ditangan para koruptor dan penjudi sungguh mengkuatirkan masa depan negara dan bangsa kita yang selalu menjadi nominator negara terkorup. Dengan demikian menjadi sangat wajar jika pada pemilu 2004 lalu, termasuk pilpres sarat dengan politik uang, juga menjadi arena bagi politisi busuk untuk cuci tangan dan bagi koruptor dan penjudi untuk meraup keuntungan. Karena itu, menjadi wajar juga arena pemilu 2009 ini menjadi ajang pertarungan, apakah hasil pemilu mempercepat transisi demokrasi ke demokrasi subtansianl atau justru menjadi sebaliknya berdaya rusak terhadap sistem politik yang sedang dibangun ?

BUDAYA POLITIK DAN PERILAKU VOTING

Untuk melihat pemilu sebagai praktek demokrasi, tidak hanya melihat dari segi institusinya, seperti Undang-Undang, proses penyelenggaraan dan kualitas peserta pemilu (parpol dan perorangan) tetapi yang tak kalah pentingnya dari sisi pemilih (konstituen). Karena pemilihlah yang menjatuhkan putusannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada siapa ia memberikan mandat untuk memerintah atau mewakili, maka penting dielaborasi pola perilaku voting[16] para pemilih. Apakah pemilih berorientasi pada partai, kandidat, program, atau idiologis ? Apakah pemilih kritis-rasional atau terikat pada komunalitas ?

---

[16] Voting behavior didefenisikan sebagai *the decision making processes and the social factor influencing pattern of voting* Lihat D. Jary & J. Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Harper Collins of Publishers, Great Britain. Hal. 694. Juga Lipset dalam *Encyclopedia of Sociology*. Vol. 4, Oxford, 1992. Hal. 2234-2240.

Pola perilaku voting melekat pada budaya politik, karena itu aspek budaya politik penting untuk dielaborasi lebih lanjut. Dalam studi perilaku voting ada 3 mashab yang populer dan sering menjadi acuan, yaitu (1) mashab sosiologis yang dikembangkan oleh *Colombia's University Bureau of applied sosial science;* (2) mashab psikologis yang dikembangkan oleh *University of Michigan's Survey Research Center;* dan (3) mashab yang menekankan pada pendekatan ekonomis[17]. Mashab sosiologis yang cenderung dinilai deterministis mempercayai bahwa kelas sebagai pengelompokan sosial sekaligus merupakan landasan pengelompokan politik. Sedangkan mashab psikologis lebih menekankan pada 3 aspek dalam *voting*, yaitu keterikatan pada partai, orientasi pada calon presiden-legislatif, serta isu-isu politik berkembang. Sementara mashab ekonomis memperhatikan pertimbangan untung rugi bagi memilih dalam memilih partai atau kandidat. Partai mana yang paling besar memberikan keuntungan ekonomi, akan makin besar pula peluangnya dipilih oleh konstituen.

Meskipun teori voting berkembang di Amerika dan Eropa, terdapat bukti-bukti empiris yang mendukung teori itu berlaku di tanah air, selain terdapat pula bukti yang kurang mendukung. Yang mendukung misalnya pada masa orde baru mobilisasi politik sangat gencar, sehingga demi menjamin kesinambungan usaha atau pekerjaannya, banyak orang terpaksa memilih Golkar.

Jika dihubungkan dengan mashab psikologis yang salah satunya menekankan pada orientasi calon presiden dan parlemen, tampaknya juga relevan. Pada pilpres putaran pertama dan kedua 2004 lalu., suara partai politik tidak paralel prosentasinya dengan suara kandidat yang diusung oleh partai. Pasangan SBY-JK misalnya yang diusung oleh partai Demokrat, PBB dan belakangan PKS memperoleh suara signifikan, pada perolehan suara partai tersebut tidak sebanyak Golkar dan PDI-P yang mengusung Mega-Hasyim. Kecenderungan ini semakin terbukti di daerah, seperti di Sulawesi Selatan, dimana

---

[17] Lihat E.F. Borgatta, Encyclopedia of Sociology, Vol. 4, M.M. Inter. New York-Oxford, 1992. hal. 2234-2240; J. Kristiadi, Pemilihan Umum dan Pola Perilaku Pemilih di Indonesia, Prisma, No, 3 tahun 1996, hal. 76.; dan A. Gaffar, Javanese Voter. Gama Univ. Press, 1992, hal. 4-6.

Golkar yang memenangkan pemilu legislatif (44%), hanya meraih 38% pilpres putaran pertama bagi Wiranto-Wahid. Sedang SBY-JK yang diusung partai Demokrat yang memperoleh suara 3% pada pemilu legislatif, unggul 42% pada putaran pertama, dan semakin kuat lagi (75%) pada putaran kedua.[18]

Menurut hasil penelitian Lindle dan Muzani, budaya politik bangsa Indonesia yang menjadi basis bagi voter untuk memilih partai politik belum banyak berubah sejak tahun 1955, ketika pemilu pertama kali digelar sampai pada pemilu terakhir.[19] Selanjutnya dikemukakan 7 faktor yang mempengaruhi perilaku memilih ditinjau dari sudut budaya politik, yaitu: (1) Keyakinan keagamaan dan otokrasi politik; (2) Etnik dan Loyalitas Kedaerahan; (3) Kelas sosial (kepentigan ekonomi); (4) Pertemanan dengan pemimpin parpol, nasional dan daerah; (5) Kapatuhan pada petua pemimpin lokal atau patron; (6) Restrospeksi evaluasi tampilan atau concern parpol dan partisan.

Faktor pertama dan kedua di atas semakin diperkuat dengan hasil penelitian lain yang menyimpulkan bahwa politik aliran yang berorientasi paham keagamaan dan etnis (daerah) masih besar pengaruhnya dalam pemilu era orde reformasi, selain faktor kepentingan elit (lokal) yang juga sangat menentukan. Jika seorang elit dekat dengan tokoh partai tertentu, maka massanya pun potensial digiring ke sana.[20] Dalam konteks ini pemilih dimobilisasi oleh elit, bukan kesadaran pemilih untuk menentukan pilihan politiknya sendiri.

Pemanfaatan teori di atas sebagai pisau analisa perilaku memilih (*voting behavior*) perlu didukung teori lain yang berhubungan dengan teori perilaku dan atau budaya politik. Teori Geertz tentang *politik aliran* melalui trikotominya, *Abangan, Santri dan Priyayi* dan teori Wertheim tentang *politik patron client juga* menarik dikaji. Dengan politik aliran berarti tiap partai politik senantiasa terkait dengan para pengikut dari suatu kebudayaan tertentu di tingkat bawah. Suatu

---

[18] Lihat Fokus Kompas, *Publik tidak dimudah digiring koalisi elit.* Tanggal 17 Juli 2004,

[19] Lihat PH. Khaidir, *Signifikansi Masyarakat Politik Pragmatis.* Kompas, 28 Juni 2002.

[20] Lihat R. Taqwa, *Perilaku Memilih dan Politik Kepartaian.* Jurnal Sosiosains, Pasca Sarjana UGM. No. 17 (3) Juli 2004. 554-555.

pengelompokan politik atau afiliasi politik yang didasarkan pada aliran budaya yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan kerangka itu, Kuntowijoyo mengklasifikasikan elit birokrasi atau priyayi bergabung dalam PNI (Partai Nasional Indonesia), kaum abangan ke dalam PKI (Partai Komunis Indonesia), dan kaum santri kedalam Masyumi dan NU.[21] Keempat partai ini menjadi kekuatan terbesar dalam perpolitikan nasional 1950-an sampai 1960-an. Klasifikasi di atas meskipun ada konsistensi, tetapi diakui oleh Kuntowijoyo ada pertentangan, karena tidak ada perbedaan tajam dalam orientasi budaya antara PNI dan PKI. Sebagaimana tidak adanya perbedaan tajam antara abangan dan priyayi yang sama-sama longgar dengan nilai-nilai Islam. Dia mensinyalir pasca tahun 1965 merupakan akhir pertarungan politik aliran, karena telah terjadi perubahan dimana kaum abangan dan priyayi semakin banyak memasuki sekolah agama, sebaliknya kaum santri banyak memasuki sekolah umum.[22]

Namun demikian, pendekatan Geertz masih banyak digunakan untuk menganalisis perilaku memilih. Penelitian Mulkhan misalnya masih mengacu pada trikotomi Geertz.[23] Alasannya, bahwa proses hegemonisasi dalam sistem pengetahuan ummat belum terlalu merata di pedesaan, dibandingkan dengan perkotaan yang banyak dilihat oleh Kuntowijoyo. Pendidikan yang belum merata, dimana pendidikan di luar pulau Jawa masih tertinggal, khususnya di kawasan Timur Indonesia, menjadi salah satu peluang masih memungkinkan berlakunya trikotomi Geertz tentang politik berdasarkan aliran.

Menurut King, pemilu 1955 masih memiliki kesamaan dengan pemilu era reformasi dalam hal perilaku memilih yang berbasis aliran.[24] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemilu pertama dan terakhir sudah berselang 49 tahun, namun politik aliran masih

---

[21] Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi.* Mizan, Bandung, 1991. hal. 144, dan AS. Hikam, *Demokrasi & Civil Society. LP3ES, Jakarta, 1999. hal. 61.*

[22] Dalam Taqwa. *Budaya Politik di Indonesia, Suatu Tinjauan Teoritis.* Empirika, Vol. III, No. 2, 1999.

[23] A. M. Mulkhan, *Perubahan Prilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam.* Rajawali Press, 1989, hal. 57.

[24] Lihat R.A. Basweden, *Memerdekakan Arena Politik Daerah.* Kompas, 26 November 2001:hal.4-5. dan S. Yusuf, *Prospek Pemilu 2004.* Kompas, 29 Januari 2003.

mewarnai pesta demokrasi itu. Dengan kerangka berpikir ini diasumsikan bahwa pemilu 1999 dan 2004 lalu, masyarakat memilih atau berafiliasi pada partai atas dasar sealiran budaya politiknya, seperti pada 1955. Kalau demikian yang terjadi, maka diasumsikan bahwa sebagian besar kaum abangan memilih PDI-P, Priyayi atau birokrat, teknokrat masih sebagian besar memilih Partai Golkar dan Demokrat, dan kaum santri sebagian besar memilih partai yang berlabel atau barbasis ummat Islam, seperti PPP, PKB, PAN dan PKS yang banyak didukung mantan aktifis muslim kampus. Kecenderungan ini didukung oleh realitas politik dimana ketiga kelompok politik di atas (nasionalis, kekaryaan-golongan fungsional dan keagamaan–Islam) yang dominan di DPR.

Sementara pengelompokan politik model politik patron-client tidak didasarkan atas aliran budaya atau solidaritas kelas, tetapi didasarkan pada hubungan antara para patron dengan client-nya. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang berantai yang tiada putus-putusnya.[25] Perwujudan hubungan patron client ini menurut Usman adalah adanya perbedaan jarak sosial yang lebar antara patron dan client, baik secara ekonomi maupun politik. Client yang lemah selalu dituntut untuk setia dalam rangka memperkuat patronnya. Dan kesetiaan itu semakin diperlukan pada saat patron dalam situasi tertentu, seperti pemilu. Sebaliknya patron pun memberikan bantuan baik ekonomi maupun berupa jasa (keuangan) kepada klientnya sebagai *reward* terhadap kepatuhan itu. Dalam konteks politik patron client pada arena pemilu, peranan elit lokal penting diperhatikan, baik itu elit adat, agama, ekonomi dan birokrasi-militer.[26] Hal ini makin diperkuat dengan rekruitmen sejumlah tokoh kharismatis, populer dan sekaligus populis pada pemilu.

Kalau kita mengacu pada teori di atas sebagai perwujudan praktek pemilu di tanah air, tampaknya belum memberikan jaminan akan terwujudnya praktek demokrasi subtansial, tetapi masih prosesdural. Karena yang paling subtansial, bukan pada adanya hubungan patron atau identifikasi kepartaian dan hubungan

---

[25] Kuntowijoyo. *Agama, Negara dan Formasi Sosial.* Prisma No. 8, 1984: hal. 38.

[26] Lihat Taqwa, *Perilaku Politik Ummat Islam di Lekkong*, Prisma, No. 3, 1996, hal. 40-42

primordial, tetapi terutama pada pilihan yang rasional dan kritis. Di sinilah persoalan mendasar dari budaya politik kita karena belum berkembangnya pemilih rasional dan kritis dan itulah yang masih berlaku secara nasional.[27] Hal ini pula yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi kita untuk membangun demokrasi yang lebih baik (subtansial).

PENUTUP

Hasil pemilu, baik 1999 maupun 2004 lalu, selain ada kemajuan, juga masih terdapat sejumlah kelemahan, seperti masih banyaknya pelanggaran pemilu yang tidak ditindak lanjuti, baik administratif maupun pidana pemilu. Kelemahan lain masih minimnya wakil rakyat yang memiliki legitimasi tinggi, karena sebagian besar anggota legislatif pada pemilu 2004 lalu terpilih karena nomor urut, bukan terpenuhinya BPP. Diharapkan pada pemilu 2009 ini, sejumlah kelemahan tersebut dapat teratasi, sehingga semakin mendekatkan pada tujuan pemilu yang subtansial.

Pemilu era reformasi, khususnya 2004, justru menjadi arena legitimasi baru para kader partai Golkar, termasuk PDI-P, sebagai partai yang pernah memerintah untuk duduk di legislatif, baik di DPR maupun di DPD yang sebagian di antaranya termasuk politisi busuk. Sedang ikatan komunal dan aliran kembali menguat, dimana sejumlah ulama dan juga kalangan ningrat (keraton) yang masuk senayan melalui DPD, seperti Ratu Hemas dari Yogjakarta, dan BRA. Moeryati Sudibyo dari Jakarta, dan Tokoh NU baik dari Jateng maupun Jatim juga sebagai anggota DPD. Jadi meskipun sistem pemilunya sudah baru, namun wajah anggota legislatifnya masih yang wajah lama.

Pada umumnya pemilih belum menjadi pemilih yang rasional dan kritis. Faktor primordialism, aliran dan hubungan patron serta kepentingan ekonomi sesaat masih menjadi referensi untuk menjatuhkan pilihan pada partai. Selain itu faktor pencitraan yang dilakukan oleh media massa, terutama terhadap kandidit pada

---

[27] Lihat E.S Fatah, *Menuntaskan Perubahan* (1). Mizan, 2000, hal. 236-239.

pemilihan presiden tahap pertama dan kedua juga sangat menentukan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Pencitraan melalui media yang memerlukan biaya yang sangat besar, mengurangi kompetitifnya arena pemilihan, karena tidak semua pasangan-kandidat mampu menyediakan dana kampanye untuk iklan di media cetak dan elektronik.

Untuk masa mendatang masih diperlukan pendidikan politik secara berkelanjutan supaya semakin tumbuh jiwa kritis dan kedewasaan pemilih untuk berpartisipasi dalam politik praktis seperti halnya pemilu. Selain itu masih diperlukan penguatan pada institusi pemilu, khususnya UU pemilu dan Partai Politik dan perangkat peraturan lain yang mendukung. Penyempurnaan UU pemilu senantiasa perlu diuji kehandalannya dilapangan, sehingga jika diperlukan perbaikan lagi pada pemilu berikutnya. Demikian pula penyelenggara pemilu perlu terus didorong untuk tertap berlaku adil dan profesional serta non partisan, khususnya di daerah-daerah.

Perlu mekanisme yang demokratis dan transparan di internal partai, pada saat pencalonan atau rekruitmen. Kalau tidak, maka akan terjadi kembali dimana hampir semua anggota dewan terpilih karena berada diurutan atas (calon jadi). Sehingga tingkat legitimasinya pun terbatas. Padahal pada tahap ini sangat penting artinya untuk menyeleksi kandidat yang terbaik. Selama ini caleg yang masuk pada urutan jadi karena tiga hal. Pertama, sumbangannya (gizi) kepada partai atau pimpinannya cukup besar; kedua, memang memiliki otoritas untuk menentukan (pengurus inti); dan ketiga, faktor kedekatan calon dengan pengurus partai, khususnya tingkat pusat.

Diharapkan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan kelembagaan dan proses penyelenggaraan pemilu di semua lini, maka pesta demokrasi di masa mendatang akan semakin baik, semakin demokratis, wakil rakyat terpilih semakin *legitimate* dan pemerintah yang terpilih pun akan mampu menuntaskan semua agenda-agenda reformasi. Hanya dengan demikian pemilu sebagai praktik demokrasi subtansial akan mendekati kenyataan. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara.* Bina Aksara, Jakarta.

Borgatta, Edgar F (editor). 1992. *Encyclopedia of Sociology*, Volume 4. Maxwell Macmillan International. New York-Oxford, Singapore-Sydney.

Bufacchi, Vittoria, 2001. *Voting Rationality and Reputation.* Political Studies Association. Vol. 49, page 714-729. Oxford, UK.

Duverger, Maurice. 2002. *Sosiologi Politik.* Terj. Daniel Dhakidae. Rajawali, Jakarta.

Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: a Case Study of Election under a Hegemonie Party System.* Gadjah Mada, University Press. Yogyakarta.

Geertz, Clifford. 1984. *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.* Terj. Pustaka Jaya, Jakarta.

Gibbons, M.T. 2002. *Tafsir Politik: Telaah Hermeneutis, Wacana Sosial Politik Kontemporer.* Qalam, Yogyakarta.

Jary, David dan Julia Jary. 1991. *Collins Dictionary of Sociology.* Harper Collins of Publishers, Great Britain.

Khairudin, 2005. *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kotler-Berkewitz, Laurence A. 2001. *Religion and Voting Behavior in Great Britain: A Reassessment.* The British Journal of Political Science. Vol 31, Page 523-554. Cambridge University Press.

Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia.* Prisma, No. 3, hal. 73-91.

Kristiadi, J. Dkk. 2009. *Who wants to be the next president?* Kanisius, Yogyakarta.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi.* Mizan, Bandung.

Lipset, Seymour Martin. 1995. *The Encyclopedia of Democracy.* Volume III dan IV: Congressional Quarterly, Washington, D.C.

Mappawata, Tatjong. 1990. *Hubungan Patron Client.* Jurnal Tamalanrea, Edisi pertama. Ujung Pandang.

Mulkhan, Abdul Munir. 2002. *Strategi Budaya Mimpi Kemenangan Politik Santri Bagi Rakyat Kebanyakan.* Media Inovasi. No. 2, th XI/2002, hal. 6-23.

Mulkhan, Abd. Munir. 1989. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam, 1965-1987.* Rajawali Press, Jakarta.

Pamungkas, Sigit. 2009. *MK dan Kedaulatan Rakyat.* Kompas, 19 Januari 2009. H

Putra, Heddy S. Ahimsa. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan.* Gama University Press. Yogyakarta.

Taqwa, M. Ridhah. 1996. *Perilaku Politik Ummat Islam, Kasus di Lekkong Sulawesi Selatan.* Prisma, No. 3, hal. 36-46.

Taqwa, M. Ridhah. 1999. *Budaya Politik di Indonesia, Suatu Tinjauan Teoritis.* Majalah Empirika, Vol. III, No. 2. Hal. 3-10.

Usman, Sunyoto. 1993. *Pergeseran Varian Abangan-Santri.* Republika, 5 Juni, hal. 5.

***